

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang bersifat multidimensional, tidak hanya bersifat individual yang melihat kemiskinan sebatas ketidak mampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kemampuan hidupnya atau kesejahteraan keluarganya. Akan tetapi terkait berbagai faktor, oleh karenanya perlu penanganan yang serius dalam pemecahannya. Kemiskinan juga merupakan isu penting dalam pembangunan di negara – negara berkembang termasuk di Indonesia. Selama ini, strategi pembangunan digalakan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Pada awalnya pembangunan cenderung diarahkan dari atas ke bawah (*top - down*), dimana pertumbuhan akan mengalir dari lapisan atas ke lapisan bawah.

Di dalam pembangunan *top down*, masyarakat tidak pernah dilibatkan secara langsung, baik dalam perencanaan maupun sampai evaluasi. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, akan tetapi tidak diberikan kesempatan untuk memberdayakan dirinya sendiri, dalam hal ini untuk membuat dirinya mandiri.

Dalam hal ini, pembangunan hanya dikaitkan dengan sarana – prasarana saja, tanpa ada keinginan untuk membangun manusianya. Jika

pembangunan sarana – prasarana tersebut telah selesai tetapi masyarakat tidak bisa mengembangkannya, maka masyarakat akan bergantung pada pihak lain untuk mengembangkan kembali sarana – prasana tersebut. Oleh karena itu pembangunan tidak lagi digerakkan untuk pertumbuhan ekonomi semata, namun lebih cenderung kepada pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Yang berasumsi bahwa ketika masyarakat berdaya sebagai subyek pembangunan, maka pada akhirnya mereka akan berdaya secara ekonomi yakni dengan cara pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga masyarakat tidak akan bergantung pada pihak manapun.

Pembangunan kesejahteraan sosial di era otonomi daerah saat ini mempengaruhi peran pemerintah pusat dalam menentukan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Peran pemerintah saat ini semakin berkurang, karena pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Peran yang lebih besar dipegang oleh daerah. Daerah memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan bidang pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan prioritas masalah, kondisi, dan situasi yang dihadapi masyarakatnya. Dengan demikian, maka peran serta masyarakat di daerah menjadi lebih besar, karena mereka sebagai pemilik dan penentu pembangunan itu sendiri. Untuk itu masyarakat dituntut untuk terlibat sepenuhnya dalam seluruh proses kegiatan pembangunan. Proses pembangunan merupakan suatu siklus yang berkelanjutan, sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam satu tahapan pembangunan, tetapi dalam seluruh proses, termasuk didalamnya monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatori.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang ditujukan kepada pembangunan manusia, mensyaratkan dalam pelaksanaannya melibatkan langsung masyarakat yang dikenai pembangunan. Oleh karena itu masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Mereka mempunyai hak menentukan pembangunan yang cocok dan dapat diterima dalam kehidupan mereka.

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang sanggup mengelola potensi dan sumber yang ada di sekitarnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam segala proses pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, sampai pada tahap pengawasan. Peran aktif masyarakat dituntut untuk merancang, melaksanakan, dan juga menjadi pengawas dalam pembangunan. Karena inti dari pembangunan adalah pengembangan, yakni memberdayakan serta mengembangkan potensi dan sumber yang ada di masyarakat, dan juga memperkuat terciptanya kemandirian masyarakat. Karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Coyners (TIM Pengembangan Masyarakat, 2005 : 40) kemudian mengatakan ada tiga alasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi tersebut, maka pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam proses, karena mereka akan lebih tau seluk beluk proyek/program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, dimana masyarakat memiliki hak untuk menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayahnya (TIM Pengembangan Masyarakat, 2005 : 40).

Salah satu implementasi pembangunan berkelanjutan seperti yang telah di jelaskan diatas adalah dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan P2KP atau yang menjadi cikal bakal lahirnya PNPM Mandiri Perkotaan atau yang sekarang menjadi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 tentang pengentasan kemiskinan dan permukiman kumuh perkotaan (Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kota, 2016 : 2). Di dalam program KOTAKU terdapat wadah yang mampu memandirikan masyarakat dalam segi ekonomi, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pembangunan *bottom up*, yakni program yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam broses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi pembangunan. Program tersebut memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat berdaya. Akan tetapi dalam menuju proses tersebut tentunya tidak akan mudah, oleh karenanya diperlukan sebuah proses / tahapan dan waktu yang panjang untuk mewujudkan tujuan tersebut. BKM ini merupakan suatu kelembagaan yang dirancang untuk dapat menjadi penggerak pembangunan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Misi dari lembaga ini adalah menumbuhkan kembali ikatan sosial antar warga masyarakat untuk bekerjasama dalam kebaikan bersama serta berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berperan dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. Diantara aspek yang dikelola oleh BKM yaitu :

- a. Aspek Lingkungan,
- b. Aspek Ekonomi, dan
- c. Aspek Sosial.

Idealnya setelah adanya bantuan dari pemerintah berupa program KOTAKU melalui BKM, maka masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, seperti diantaranya :

1. Mendapatkan sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti akses jalan baik, tempat ibadah dan tempat umum seperti madrasah yang baik.
2. Mendapatkan bantuan ekonomi berupa pinjaman modal untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.
3. Masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan program KOTAKU melalui BKM.

Kenyataannya, dalam pelaksanaan kegiatan BKM belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, seperti :

1. Masih terdapatnya akses jalan masyarakat yang belum baik dan berlubang.
2. Meskipun sudah ada bantuan modal dari BKM, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang meminjam uang ke Bank Keliling atau rentenir.
3. Masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan BKM, dan masih ada masyarakat yang acuh.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa, penduduk Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya merupakan penduduk asli desa Sukamaju yang terbagi kedalam 6 RW. Mengingat geografis wilayah yang sebagian besar adalah pesawahan, maka permasalahan yang ditemukan di daerah ini adalah belum meratanya pembangunan di wilayah desa Sukamaju, hal ini dibuktikan dengan masih buruknya jalan dari wilayah RW Margahayu sampai RW Kiara Pandak.

Karena mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani, maka masalah kemiskinan menjadi salah satu hal yang harus dipecahkan. Walaupun pendapatan ekonomi di daerah ini sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat sekitar 30% masyarakat yang berpendapatan ekonomi rendah, karena umumnya mereka hanya sebagai buruh serabutan yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Kurangnya modal dan pendapatan masyarakat, menyebabkan sebagian masyarakat berani meminjam uang kepada rentenir, atau masyarakat menyebutnya dengan sebutan bank keliling untuk mengembangkan usaha maupun modal bertani untuk menyambung hidupnya. Selain itu, masih ada rumah – rumah warga di desa Sukamaju yang tidak layak huni. Oleh karena itu Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan P2KP PNPM atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) membentuk lembaga Swadaya Masyarakat yang disebut BKM yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di desa Sukamaju. BKM sebagai fasilitator mengarahkan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berpartisipasi membangun daerahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, bahkan sampai evaluasi pembangunan tersebut dengan harapan masyarakat akan memiliki tanggung jawab yang tinggi pada daerahnya, dan apabila daerahnya kembali rusak, mereka akan langsung memperbaikinya tanpa harus menunggu diperintah oleh pemerintah. Dan dengan adanya BKM tersebut, masyarakat menjadi lebih terbantu dengan adanya ekonomi bergulir yang menjadi

program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi. Dengan adanya bantuan ekonomi bergulir ini, sedikitnya masyarakat desa Sukamaju sudah lebih terbantu dan mulai meninggalkan Bank Keliling tersebut. Program ekonomi bergulir ini ditujukan kepada masyarakat desa Sukamaju yang ingin membuka usaha atau pun meminjam modal.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh program BKM. Pemberdayaan ekonomi ini merupakan program simpan pinjam untuk masyarakat yang bertujuan untuk berwirausaha.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut : bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan BKM untuk memberdayakan ekonomi masyarakat ?

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk menyusun Skripsi dengan judul “ Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, adalah :

1. Bagaimana upaya KPMD Sukamaju dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program ekonomi bergulir untuk memperbaiki perekonomian masyarakat di Desa Sukamaju ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
3. Apa hasil yang dicapai masyarakat dalam mengikuti Program KPMD Sukamaju ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya KPMD Sukamaju dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program ekonomi bergulir untuk memperbaiki perekonomian masyarakat di Desa Sukamaju.
2. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Mengetahui hasil yang dicapai masyarakat dalam mengikuti Program KPMD Sukamaju.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, serta dapat

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BKM untuk mengetahui kekurangan dan ketidaksesuaian program yang telah dilaksanakan, selain itu, BKM juga dapat meningkatkan pelayanannya terhadap keluhan serta kebutuhan masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, penelitian yang memfokuskan diri pada Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Hal ini sudah abnyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya tulis (skripsi) lainnya. Bahkan memfokuskan subyek penelitiannya pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Namun, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan hasil penelitian sebagai perbandingan, antara lain yaitu :

Pertama Skripsi oleh Diah Putriana Arifani, *Peranan BKM Dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat Dibidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP (Studi Deskriptif di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*, dari Universitas Negeri Semarang Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa peran BKM sebagai Fasilitator dalam P2KP khususnya bidang pembangunan fisik untuk dapat membentuk masyarakat mandiri sangatlah membantu sehingga masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal, karena pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat seperti membangun jalan antar Desa, pembuatan talud, dan pembuatan POLINDES. Fokus penelitian ini adalah peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat Desa Sriwulan khususnya di bidang pembangunan fisik.

Kedua Skripsi oleh Itba' Muhammad Mahyana, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Deskriptif di Kelurahan Kalisuren – Bogor)*, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat kelurahan Kalisuren dalam PNPM Mandiri dikategorikan aktif, hal ini terlihat pada keberhasilan BKM dalam merealisasikan pencarian dana bantuan KSM. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program PNPM Mandiri.

1.6 Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan keterkaitan antara latar belakang, masalah yang diangkat, telaah pustaka yang digunakan, pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diambil, maka perlu diberikan kerangka berfikir agar alur Skripsi ini mudah difahami. Kerangka berfikir dalam Skripsi yang berjudul *Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya)* adalah sebagai berikut : penelitian dipusatkan pada peranan BKM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mensukseskan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengentaskan kemiskinan, dan menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di daerahnya. Hal ini dapat terlihat karena masyarakat Desa Sukamaju berkarakteristik sebagai petani. Pada umumnya potensi dan sumber yang ada pada masyarakat belum sepenuhnya dikelola. Dengan adanya BKM ini diharapkan masyarakat mampu mengelola potensi dan sumber yang ada didaerahnya, dan mempunyai kesadaran untuk mencintai dan menjaga lingkungannya.

Adapun kaitannya dengan dakwah yakni didalam al – Qur’an Surat Ar – Ra’d ayat 11 Allah SWT berfirman :

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat – malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali – kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jika kita ingin mengharapkan kehidupan yang lebih baik, yakni kehidupan yang lebih sejahtera, maka kita sendiri yang harus mulai menata kehidupan kita menjadi lebih baik, karena kalau bukan kita, orang lain tidak akan merubahnya.

Di dalam Undang – Undang Nomor 9/ 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/ atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kota, 2016 : 2).

BKM sebagai organisasi masyarakat diharapkan benar – benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, akan mereka benar – benar terlibat aktif dan intensif dalam proses pengambilan keputusan penting, yang pada dasarnya BKM merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat kelurahan, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Sehingga mereka memiliki akses yang memadai keberbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka ssecara layak, termasuk akses – akses informasi dan sumberdaya (Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kota, 2016 : 2).

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan menurut Edi Suharto (Edi Suharto, 2004 : 122) dapat dilakukan melalui tiga tahapan :

- a. Aras mikro, pemberdayaan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *krisis intervention* tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas – tugas kehidupannya, model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
- b. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan. Dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengrtahuan, keterampilan, dan sikap – sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

- c. Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan) (Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 831).

Sedangkan dalam kamus sosiologi partisipasi adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu (Soejono Soekanto, 1993 : 355). Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Jim Ife menyatakan bahwa “partisipasi merupakan hak dari warga masyarakat. Oleh karena itu, apabila di antara warga masyarakat ada yang tidak dilibatkan dalam pembangunan yang ada dilingkungannya, berarti

telah terjadi pengabaian akan hak warga tersebut” (TIM Pengembangan Masyarakat, 2005 : 40).

Peran masyarakat merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Karena pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan untuk membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses – proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu (Jim Ife dan Frank Tesoreiro, 2008 : 285).

Definisi partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena berjalannya proses – proses dalam pembangunan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan warganegaranya merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuat keputusan. Dalam arti partisipasi alat dan juga tujuan, karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM bagi setiap warganegara. Sebagai sebuah tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keputusannya.

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang sanggup mengelola potensi dan sumber yang ada di sekitarnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam segala proses pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, sampai pada

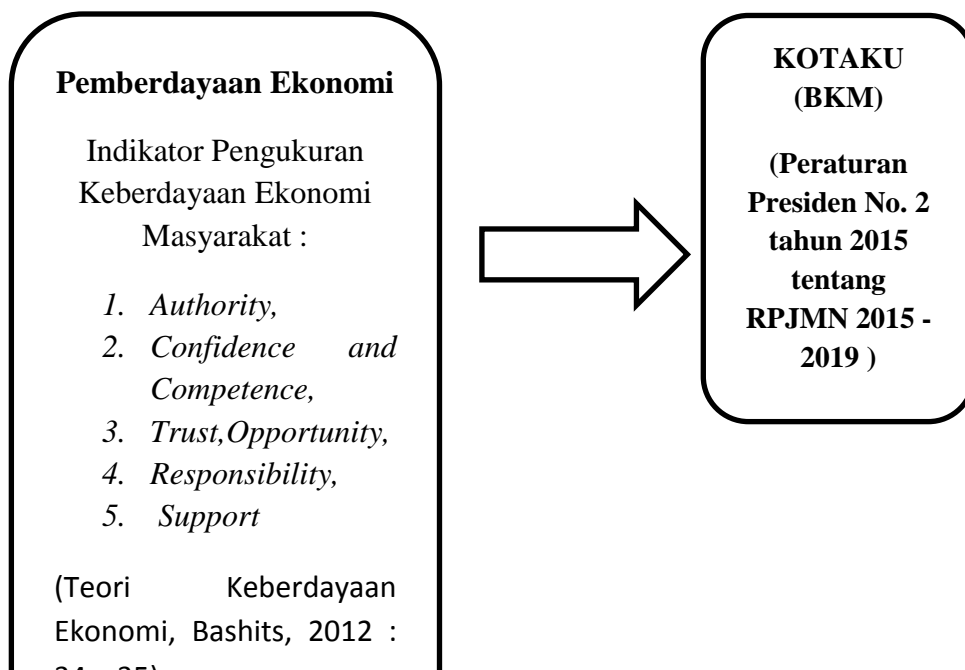
tahap pengawasan. Peran aktif masyarakat dituntut untuk merancang, melaksanakan, dan juga menjadi pengawas dalam pembangunan. Karena inti dari pembangunan adalah pengembangan, yakni memberdayakan serta mengembangkan potensi dan sumber yang ada di masyarakat, dan juga memperkuat terciptanya kemandirian masyarakat. Karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

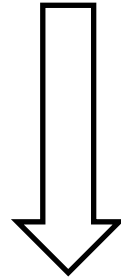
Kesejahteraan sosial dalam Undang – Undang Dasar No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut : kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penmghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniyah,dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat, dan menjunjung tinggi hak – hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila (Muhidin Syarif, 1997 : 5).

Adapun pengertian kesejahteraan sosial pada dasarnya diciptakan atas tiga elemen, yaitu :

- 1) Sejauh mana masalah sosial diatur
- 2) Sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi, dan
- 3) Sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat dipenuhi

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berfikir diatas,
maka dibuatkan skema seperti berikut ini :





Kesejahteraan Masyarakat

Manusia Mampu Memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) :

- a. Kebutuhan Sandang
- b. Kebutuhan Pangan
- c. Kebutuhan Papan

(Danim, 1995 : 35-36)

1.7 Langkah – langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti dilahirkan di daerah ini, oleh karena itu sedikit banyaknya peneliti bisa mengetahui dan merasakan kondisi yang ada di masyarakat.

1.7.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengemukakan jenis penelitian deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Whintney, 1960). Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat serta tata caranya berlaku dalam masyarakat, seperti hubungan antar masyarakat, kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan, dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam metode deskriptif, peneliti membandingkan fenomena – fenomena tertentu, yang dalam penelitian ini yakni fenomena masyarakat dalam meminjam modal pada rentenir atau bank keliling serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BKM, sehingga merupakan studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena – fenomena dengan menetapkan suatu standar tertentu, sehingga banyak ahli menamakan studi deskriptif ini dengan *motive survey*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *motive survey* (metode survey). Alasannya menggunakan metode tersebut karena salah satu sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini dengan menggunakan angket atau penyebaran kuisisioner.

1.7.3 Jenis Data

Jenis Data merupakan jawaban terhadap penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Maka jenis data yang di ajukan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program ekonomi bergulir di Desa Sukamaju.
- b. Partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program Pemberdayaan Ekonomi BKM di Desa Sukamaju.
- c. Hasil yang dicapai masyarakat dalam mengikuti program BKM.

1.7.4 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber data, yaitu :

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Sehingga teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer antara lain observasi, wawancara dengan pengurus BKM, pengurus Desa Sukamaju, dan masyarakat Desa Sukamaju, melaksanakan diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Bahan Pustaka berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini, laporan, jurnal, hasil penelitian orang lain, dll.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai hasil yang maksimal, peneliti berusaha menyajikan teknik pengumpulan data yang sekiranya dapat mengantarkan data yang benar – benar valid dan mendukung. Dalam hal ini peneliti memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja BKM serta keaktifan masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya dalam mengikuti program BKM.

2) Wawancara

Wawancara yang di pakai adalah wawancara semi terstruktur yang dipakai adalah pertanyaan terbuka kepada koordinator BKM dan pejabat kelurahan mengenai mekanisme dan struktural BKM. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada warga setempat untuk mengetahui dan memahami penyelenggaraan serta ragam kegiatannya. Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan, dan bertatap muka langsung.

3) Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, yakni dianalisis, diinterpretasikan, dan disimpulkan. Dalam menganalisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Yakni analisis dilakukan sampai pada taraf deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.